

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Aris Listianto
NIM. 14.0102.0139

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:

**NAMA : ARIS LISTIANTO
NIM : 14.0102.0139
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Listianto

NPM : 14.0102.0139

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 20 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Aris Listianto

NPM. 14.0102.0139

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aris Listianto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 30 April 1993
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jetis, RT 03 RW 01, Ngimbrang, Bulu,
Temanggung, Jawa Tengah
Alamat Email : arrislistianto@gmail.com

Pendidikan Formal :

SD (1999-2005) : SD Negeri 1 Ngimbrang
SLTP (2005-2008) : SMP Negeri 1 Bulu
SMA (2008-2011) : SMK Negeri 1 Tembarak
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah
Magelang.

Magelang, 20 Agustus 2018
Peneliti



Aris Listianto
NIM. 09.0102.0139

MOTTO

*“Memang baik menjadi orang penting, namun lebih penting menjadi orang baik”
(Aris Listianto)*

*“Sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(Sabda Rasulullah)*

*“Jika Kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”
(QS. Al-Isra:7)*

*“Seorang hamba yang dikatakan bahagia itu jika ia mampu untuk menyederhanakan keinginannya”
(Al Ustadz Nashim Mukhtar)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Drs. Marlina Kurnia, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing dan Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Kepala OPD dan staf pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung, penulis ucapkan terima kasih atas izin untuk meneliti di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, serta bantuan yang diberikan hingga memudahkan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Desa Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, penulis ucapkan terima kasih atas izin dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan juga materiil.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Magelang, 20 Agustus 2018
Peneliti



Aris Listianto
NPM. 14.0102.0139

DAFTAR ISI	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Riwayat Hidup	Error! Bookmark not defined.
Motto	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	10
A. Telaah Teori.....	10
B. Penelitian terdahulu	19
C. Perumusan Hipotesis.....	21
D. Kerangka pemikiran	29
BAB III METODA PENELITIAN	30
A. Populasi dan Sampel.....	30
B. Data Penelitian.....	30
C. Metoda Analisis Data.....	33
D. Pengujian Hipotesis	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Statistik Deskriptif Data	Error! Bookmark not defined.
B. Statistik Deskriptif Responden	Error! Bookmark not defined.
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
E. Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.
F. Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
G. Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Keterbatasan.....	41
C. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan PEMDA	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Definisi dan Pengukuran Variabel	31
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	40
Tabel 4.2	Profil Responden.....	41
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.4	Pengujian Validitas.....	44
Tabel 4.5	<i>Cross Loading</i>	44
Tabel 4.6	Pengujian Reabilitas	47
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana	48
Tabel 4.8	Uji R^2	50
Tabel 4.9	Uji F.....	50
Tabel 4.10	Uji t.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	29
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F	38
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t	39
Gambar 4.1 Uji F	51
Gambar 4.2 Nilai Uji t Variabel Sumber Daya Manusia terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrua.....	52
Gambar 4.3 Nilai Uji t Variabel Komitmen Organisasi terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrua.....	52
Gambar 4.4 Nilai Uji t Variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrua.....	53
Gambar 4.5 Nilai Uji t Variabel Persepsi Mahasiswa terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi menjadi Akuntan Publik.....	53
Gambar 4.6 Nilai Uji t Variabel Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrua.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar OPD Kabupaten Temanggung	70
Lampiran 2	Surat Permohonan Ijin Riset	71
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian	72
Lampiran 4	Tanda Terima Kuesioner	74
Lampiran 5	Daftar Distribusi Kuesioner	78
Lampiran 6	Kuisisioner Penelitian	79
Lampiran 7	Tabel Uji Validitas Kedua	92
Lampiran 8	Tabulasi Data Kuisisioner Sebelum Pengujian Validitas	93
Lampiran 9	Tabulasi Data Kuisisioner Sesudah Pengujian Validitas.....	99
Lampiran 10	Uji Validitas	105
Lampiran 11	Uji Reliabilitas	111
Lampiran 12	Analisis Regresi Linier Berganda	113

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

**(Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung)**

Oleh:

Aris Listianto

14.0102.0139

Penelitian ini menguji pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan teknologi informasi terhadap keberhasilan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian ini penting karena menanggapi terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan basis akrual yang mulai diberlakukan secara penuh bagi semua Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tahun 2015. Penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual menandakan telah berakhirnya masa PP No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), yang diyakini dapat memberikan landasan bagi implementasi akuntansi pemerintahan yang lebih baik. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu bendahara dan staff keuangan/akuntansi pada OPD Kabupaten Temanggung. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 68 responden atau 74,7%. Hasil penelitian membuktikan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan pemerintah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sedangkan sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap keberhasilan pemerintah dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Teknologi Informasi, Akrual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tata kelola keuangan negara yang terus diupayakan oleh pemerintah telah melahirkan perundang-undangan keuangan negara baru. Salah satu target perkembangan keuangan negara adalah tercapainya tata kelola keuangan yang baik. Pada UU No 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) mengharuskan penerapan standar akuntansi basis akrual untuk belanja dan pengakuan pendapatan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang menandakan telah berakhirnya masa PP No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang diyakini dapat memberikan landasan bagi implementasi akuntansi pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah akan menerapkan SAP berbasis akrual yang akan diberlakukan secara penuh bagi semua Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah pada tahun 2015 (Tempo, 2010). Tentu hal ini sulit diwujudkan merujuk pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) yang dilakukan oleh BPK. Tiga tahun setelah PP No 71 Tahun 2010 disahkan menunjukkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu jika banyak pemerintah kota dan

kabupaten di Indonesia mampu mendapat opini WTP, maka dapat diasumsikan kewajiban untuk menerapkan basis akrual penuh pada tahun 2015 tidak akan menghadapi kendala yang berarti.

Data yang diakses dari www.bpk.go.id menunjukkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Kabupaten Temanggung telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2012 sampai 2017. Meskipun begitu, data yang diakses pada www.semarang.bpk.go.id menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015, sistem akuntansi yang diterapkan adalah akuntansi kas menuju akrual atau *cash toward accrual* dimana pendapatan dan belanja dicatat berdasarkan kas yang di terima atau kas yang dikeluarkan dari kas negara, sedangkan pencatatan aset, utang dan ekuitas menggunakan basis akrual atau berdasarkan hak kewajiban yang timbul. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemerintah Kabupaten Temanggung mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual dengan serius agar kualitas laporan keuangan dapat terjaga.

Pencapaian yang baik bagi Kabupaten Temanggung setelah 6 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012-2017 (BPK, 2017). Berikut daftar Tabel 1.1 opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2016.

Tabel 1.1
Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten Temanggung

Tahun	Opini
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Semarang.bpk.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan tidak adanya penurunan kualitas pelaporan keuangan antara sebelum dan sesudah penerapan SAP Akrual pada tahun 2015, khususnya dalam hal keandalan pelaporannya. Tidak adanya penurunan kualitas pelaporan dengan hasil WTP belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa penerapan SAP akrual berhasil diterapkan. Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Perubahan pengelolaan keuangan negara yang lebih jelas dan pertanggungjawaban yang lebih cepat serta lengkap sesuai SAP.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapainya diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian Sugiarto (2014), tentang faktor-faktor pendukung atas keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan di Kota Solo menunjukkan hasil bahwa sumber daya manusia, komitmen, motivasi dan

budaya berpengaruh, namun perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah.

Penelitian Iznillah (2015), tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan hasil bahwa kualitas SDM, komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual namun Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak mempunyai pengaruh.

Penelitian Azman (2015), tentang analisis komitmen organisasi, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur serta sistem informasi dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual studi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi yang baik, Kesiapan SDM yang baik, kesediaan infrastruktur yang baik dan Sistem Informasi yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan berbasis akrual.

Penelitian Narjati (2016), tentang implementasi akuntansi berbasis akrual pengujian determinan dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga menunjukkan hasil bahwa Penggunaan Aplikasi SAIBA, budaya organisasi dan pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas LKKL.

Penelitian Suareni (2017), tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern terhadap

keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, berdasarkan hasil penelitian dan teori serta penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka secara parsial kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual pada SKPD Kabupaten Bangli dan secara simultan variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Suareni (2017) dengan persamaan menggunakan keseluruhan variabel. Sedangkan perbedaannya yaitu **Pertama**, menambah variabel budaya organisasi, merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono (2004), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah budaya organisasi dan cara pengorganisasiannya. Budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Kedua, menambah variabel teknologi informasi, merupakan perangkat pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Menurut Hamzah (2009) Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, dan pengolahan

informasi, Sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis yaitu perangkat keras (*hardware*) berupa unit komputer. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Sesuai pada penelitian Pratiwi (2015) dan Satrio (2016) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kesiapan Implementasi SAP Berbasis Akrua. Ketidaktersediaan teknologi informasi ini, tentu akan menjadi penghambat dalam penerapan akuntansi berbasis akrua penuh.

Ketiga, objek penelitian di OPD Kabupaten Temanggung, pada OPD Kabupaten Temanggung berdasarkan opini hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam kurun waktu 6 tahun (2012-2017) berturut-turut mendapatkan opini WTP, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan tidak adanya penurunan kualitas pelaporan keuangan antara sebelum dan sesudah SAP akrua diterapkan pada tahun 2015. Tidak adanya penurunan kualitas laporan belum bisa dijadikan dasar untuk menilai bahwa SAP akrua sudah diterapkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua penuh dipilih untuk penelitian ini mengacu pada Keputusan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Penerapan Sistem Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua akan diberlakukan per 1 Januari 2015 kepada seluruh instansi Pemerintah baik pusat

maupun daerah, dan seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah khususnya harus siap dan serius pahami SAP secara teknis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sumberdaya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?
5. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh sumberdaya manusia terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual.
2. Menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual.
3. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.
4. Menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.
5. Menguji secara empiris pengaruh teknologi informasi terhadap

keberhasilan penerapan SAP berbasis AkruaI.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis AkruaI pada kualitas LKPD Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi peran Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan dan pelaporan laporan keuangan.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah terkait LKPD untuk mewujudkan *Good Government* dan *Good Governance*.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, konsep penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, Penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual menandakan telah berakhirnya masa PP No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

a) Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal, (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam hal hubungan keagenan dalam penerapan standar akuntansi, standar akuntansi merupakan ketentuan maupun peraturan yang menjadi dasar dalam pelaporan dan pelaksanaan pelayanan publik. Pada pemerintahan daerah di Indonesia, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan

akuntabilitas. Pada penelitian ini yang dimaksud *principal* adalah DPRD yang mewakili masyarakat dalam tujuan tanggung jawab publik dan tanggung jawab kepada pemerintah pusat sekaligus sebagai pemberi wewenang dan *agent* sebagai pihak penerima wewenang dalam hal ini adalah OPD dan PEMDA sebagai.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Pelaksanaan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 184 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka mengemban amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, KSAP sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draf Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP. Penyusunan draf SAP yang berbasis akrual tersebut dilakukan secara hati hati dengan mempertimbangkan antara lain : (1) SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005-*cash toward accrual*) baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya

diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (2) SAP berbasis akrual yang akan disusun sesuai Undang-undang Keuangan Negara mengharuskan perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan dan penganggaran, dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat ketentuan/peraturan dibidang tersebut (misalnya keharusan untuk menganggarkan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada akhir tahun buku).

Penyusunan SAP berbasis akrual dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu menyusun PSAP berbasis akrual seluruhnya dari awal; dan menyesuaikan PSAP berbasis kas menuju akrual (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) menjadi PSAP berbasis akrual dengan referensi IPSAS, dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang berlaku, administrasi pemerintahan yang ada dan kemampuan sumber daya manusia. Perkembangan terakhir, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberadaan pos piutang, asset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang

dipengaruhi oleh asas akrual.

Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintahan, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

Perbedaan konkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan SAP akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang kekayaan/ekuitas bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Penerapan SAP

berbasis akrual dapat dilakukan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintahan pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah diatur dengan peraturan menteri dalam negeri (Pasal 7 PP 71 tahun 2010).

b) Sumber Daya Manusia

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10, menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang memang berkompeten tersebut akan mampu memahami logika

akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar dan kriteria nilai informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c) **Komitmen Organisasi**

Meyer & Allen (1997) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi.

Konsep tentang komitmen organisasi berkembang pada studi awal mengenai loyalitas individu yang diharapkan ada pada diri karyawan. Komitmen organisasi adalah derajat sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan kekuatan identifikasinya terhadap suatu organisasi tertentu. Komitmen organisasi ditandai dengan tiga hal, yaitu; (1) Suatu kepercayaan yang kuat terhadap organisasi dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi; (2) Keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan yang kuat dengan organisasi; (3) Kesiapan dan kesediaan untuk menyerahkan usaha keras demi kepentingan organisasi.

Menurut Sumarni (2007), Komitmen organisasi yang dimiliki karyawan instansi pemerintah akan membuat karyawan menunjukkan

sikap dan perilaku positif terhadap instansinya, karyawan akan memiliki jiwa untuk membela instansinya, berusaha meningkatkan prestasi dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan yaitu meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

d) Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian merupakan pelaksanaan atau tindakan langsung dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan menyediakan keyakinan yang memadai mengenai informasi pelaporan keuangan perusahaan.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP No.60 Tahun 2008).

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan pemerintah (UU NO.1 tahun 2004 Pasal 58).

Maksud tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus adalah pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan dapat seperti menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya

kebijakan pimpinan yang akan dapat meningkatkan kinerja.

e) Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sehingga, secara langsung ataupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. Budaya merupakan faktor lingkungan yang paling kuat mempengaruhi sistem akuntansi suatu negara dan juga bagaimana individu dinegara tersebut menggunakan informasi akuntansi. Budaya organisasi berpengaruh kuat terhadap kinerja pegawai. Budaya adalah nilai dan sikap yang digunakan dan di yakini oleh suatu masyarakat atau negara (Chatab, 2007 : 10).

Dalam Teori implementasi kebijakan Edward III (1980) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi adalah sikap implementor dalam bentuk penerimaan atau penolakan untuk melaksanakan kebijakan. Penerimaan dan kemauan untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual ada di tangan Kementerian/Lembaga selaku agen pelaksana. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat budaya organisasi. Hampir tidak ada keraguan bahwa suatu budaya sangat mempengaruhi sikap anggota organisasi (Robbins, 2002:296).

Keberadaan budaya dalam organisasi akan menjadi perekat dan

pedoman dari seluruh kebijakan perusahaan serta tuntutan operasional bagi aspek-aspek lain dalam organisasi. Budaya organisasi yang positif akan memacu organisasi ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif akan memberi dampak yang negatif bagi organisasi. Oleh sebab itu, apabila budaya organisasinya baik maka kinerja yang akan dicapai pasti juga akan baik.

f) Teknologi Informasi

Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, dan pengolahan informasi, Sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (*hardware*) berupa unit computer.

Menurut Kenneth dan Jane (2005) perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan, dan output dalam sebuah Sistem informasi. “perangkat lunak komputer merupakan sekumpulan rincian instruksi program yang mengendalikan dan mengkoordinir perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah Sistem informasi?”. Perangkat lunak (*software*) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Keuangan

Pemerintah Daerah dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan. Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
1.	Sugiarto & Alfian (2014)	Sumber Daya Manusia, Komitmen, Motivasi dan Budaya dan Perangkat Pendukung	Bahwa sumber daya manusia, komitmen, motivasi dan budaya berpengaruh, namun Perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah.
2.	Azman (2015)	Komitmen Organisasi, Kesiapan SDM, Infrastruktur dan Sistem Informasi	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi yang baik, Kesiapan SDM yang baik, kesediaan infrastruktur yang baik dan Sistem Informasi yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan berbasis akrual.
3.	Iznillah M (2015)	Kualitas SDM, Komitmen Organisasi dan Komunikasi	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa, kualitas SDM, komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual namun Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak mempunyai pengaruh.
4.	Putra & Ariyanto (2015)	Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahuu
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
5.	Pratiwi, dkk (2015)	Teknologi Informasi, Sumber Daya manusia, Komitmen dan Komunikasi	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa, Teknologi Informasi, Sumber Daya manusia, dan Komunikasi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual namun Komitmen tidak mempunyai pengaruh.
6.	Najati Ida dkk(2016)	Penggunaan Aplikasi SAIBA, Budaya Organisasi dan Pelatihan Akuntansi	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, bahwa Penggunaan Aplikasi SAIBA, budaya organisasi dan pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas LKKL.
7.	Satrio dkk (2016)	Komitmen, Regulasi dan Kebijakan; Pengelolaan SDM; dan Pengelolaan Teknologi Informasi	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa, Komitmen, Regulasi dan Kebijakan; Pengelolaan SDM; dan Pengelolaan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
8.	Slamet (2016)	Diklat/Bimtek, Komitmen Pimpinan, Sumber Daya Manusia, dan Penggunaan Aplikasi	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa, Diklat/Bimtek, Komitmen Pimpinan, Sumber Daya Manusia, dan Penggunaan Aplikasi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
9.	Adirianto & Riharjo (2017)	Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa, Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual namun Komitmen Organisasi tidak mempunyai pengaruh.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahuu
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
10.	Surareni dkk (2017)	SDM, Komitmen Organisasi dan SPI	Dari hasil koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel SDM, komitmen organisasi dan SPI dengan keberhasilan penerapan SAP berbasis aktual jika dijalankan secara bersamaan.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Aktual.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Hubungan sumber daya manusia dengan teori agensi yaitu sumber daya manusia merupakan pelaksana atau objek dalam menjalankan serta tanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat (*principal*). Sumber daya manusia akan bertindak dengan kompetensinya yang sesuai dengan kepentingan Pemerintah Pusat (*principal*), karena sumber daya manusia penting untuk menunjang

kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, termasuk dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif sumber daya manusia terhadap keberhasilan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian tersebut antara lain Davis (2012) menunjukkan Implementasi akuntansi berbasis akrual membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah. Penelitian Pratiwi (2015), menunjukkan bahwa sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia dalam suatu organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi, yang meliputi latar belakang pendidikan, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Menurutnya pencapaian dalam tujuan organisasi tepatnya mengenai sumber daya manusia maka dibutuhkanlah perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan Adirianto (2017) menunjukkan bahwa semakin meningkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah, maka akan semakin meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H1. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrua.

Komitmen Organisasi adalah Komitmen berarti kemauan dari penerimaan. Seorang individu mau bekerja keras untuk objek, sasaran-sasaran dan nilai-nilai tertentu, atau dia menjadi anggota dalam sebuah sistem. Konsep komitmen organisasi telah didefinisikan dan diukur dengan berbagai cara yang berbeda. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi (Ferris dan Aranya, 1983).

Hubungan komitmen organisasi dengan teori agensi yaitu kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan peran pemerintahan dalam mengelola tata keuangan yang baik, maka diyakini komitmen organisasi yang menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan Pemerintah Pusat (*principal*) dalam menjalankan standar pemerintah berbasis akrua, komitmen organisasi penting untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif komitmen organisasi terhadap keberhasilan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrua. Penelitian tersebut antara lain penelitian

Iznillah (2015) yang menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hasil penelitian Azman (2015), Perlu komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh sumberdaya yang ada untuk melaksanakan atau mengimplementasikan SAP basis akrual sehingga implementasi SAP basis akrual yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku disamping itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian Suareni (2017) menunjukkan Komitmen Organisasi bernilai positif antara Komitmen Organisasi dengan Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

Sistem Pengendalian Intern adalah salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*). Peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di

lingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan pemerintah (UU NO.1 tahun 2004 Pasal 58).

Hubungan sistem pengendalian intern dengan teori agensi yaitu kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan peran pemerintahan dalam mengelola tata keuangan yang baik, maka diyakini sistem pengendalian intern yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut (akrual) akan bertindak dengan cara untuk menkoordinasi dan mengendalikan Pemerintah Daerah (*agent*) yang sesuai dengan kepentingan Pemerintah Pusat (*principal*), sistem pengendalian internal penting untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap keberhasilan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian tersebut antara lain Penelitian Soimah (2014) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara. Penelitian Suareni (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal bernilai positif antara Sistem Pengendalian Intern dengan Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

Budaya organisasi merupakan keyakinan, tata nilai dan persepsi umum yang dianut secara luas dalam membentuk dan memberi arti kepada perilaku pegawai sehingga menjadi kebiasaan yang relatif sulit diubah. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi dalam melakukan tugasnya (Chatab, 2007 : 10).

Hubungan budaya organisasi dengan teori agensi yaitu kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan peran pemerintahan dalam mengelola tata keuangan yang baik, maka diyakini budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi dalam melakukan tugasnya akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan Pemerintah Pusat (*principal*), sistem pengendalian internal penting untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif budaya organisasi terhadap keberhasilan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian tersebut antara lain penelitian Narjati (2016) yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Semakin kuat budaya organisasi akan semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi

berbasis akrual. Penelitian yang dilakukan Adirianto (2017) Budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H4. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

5. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

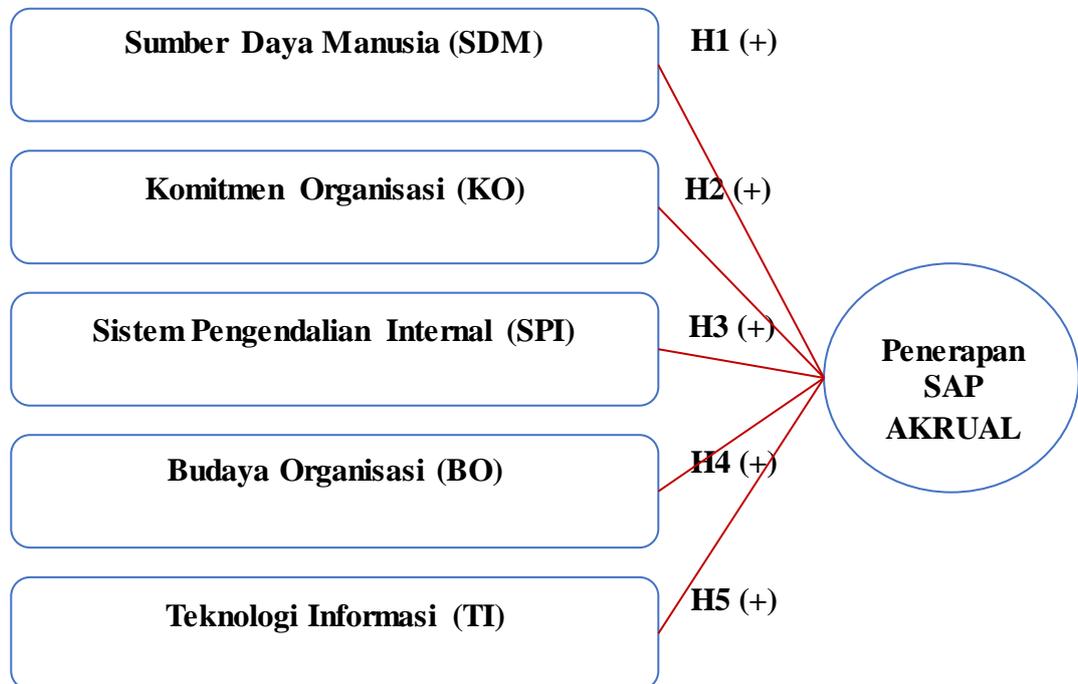
Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, dan pengolahan informasi, Sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit computer dan jaringan.

Hubungan teknologi informasi dengan teori agensi yaitu kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan peran pemerintahan dalam mengelola tata keuangan yang baik, teknologi informasi merupakan perangkat teknis yang berfungsi sebagai pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai apa yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat (*principal*) dalam menerapkan standar akuntansi akrual, sistem

pengendalian internal penting untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif teknologi informasi terhadap keberhasilan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian tersebut antara penelitian Azman (2015) yang menyatakan jaringan internet yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan belum tersedia pada hampir semua SKPD. Hasil penelitian Pratiwi (2015) teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kesiapan Implementasi SAP Berbasis Akrual. Penelitian Nadir & Hasyim (2017) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Baru dan berpengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi atau intervening standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H5. Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

D. Kerangka pemikiran

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Temanggung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara responden penelitian adalah bendahara OPD dan staf bagian keuangan/akuntansi. Jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 23 OPD dengan responden sebanyak 92 orang. Adapun penilaian jawaban responden tersebut akan diberi penilaian mengingat data-data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan maka menggunakan *skala likert* dengan rentang 1-5.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner penelitian. Sampel penelitian adalah 23 OPD Kabupaten Temanggung yaitu bendahara dan staff bagian keuangan/akuntansi. Kuesioner-kuesioner dari responden akan diseleksi terlebih dahulu agar mendapatkan kuesioner yang terisi secara lengkap sebagaimana yang dikehendaki peneliti untuk kepentingan analisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dari responden yang dijadikan sampel dilakukan melalui survei, yaitu menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden.

Daftar pertanyaan (kuesioner), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan situasi, teori terkait, dan penambahan variabel. Operasional penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuesioner secara langsung ke bendahara dan staff bagian keuangan/akuntansi di tiap OPD sesuai kriteria penelitian. Setiap paket kuesioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat didalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi responden yang meliputi jenis kelamin responden, pendidikan formal terakhir responden, latar belakang pendidikan responden, jabatan responden dan lama berkerja responden. Bagian kedua adalah pernyataan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, teknologi informasi dan penerapan SAP Akrua.

3. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel dependen :		
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrua	Akuntansi berbasis akrual berarti bahwa pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2010)	Instrumen pernyataan akuntansi, realisasi, menungguli periodisitas, pengungkapan penyajian wajar. Diukur menggunakan skala Likert 5 poin (1-5). (Kusuma, 2013)

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel
(lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen:		
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001).	Instrumen 11 butir pernyataan dengan indikator berkulitas, memiliki peran dan fungsi yang jelas, dan melakukan proses akuntansi sesuai standar. Diukur menggunakan <i>skala Likert</i> 5 poin (1-5) (Kusuma, 2013).
2. Komitmen Organisasi (KO)	Komitmen organisasi diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2006).	Intrumen 11 butir pernyataan dengan indikator loyalitas, kebanggaan terhadap perusahaan dan meningkatkan kinerja. Diukur menggunakan <i>skala Likert</i> 5 poin (1-5) (Kusuma, 2013).
3. Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Pengendalian merupakan pelaksanaan atau tindakan langsung dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan menyediakan keyakinan yang memadai mengenai informasi pelaporan keuangan perusahaan (Bastian, 2003).	Instrumen 9 butir Pernyataan lingkungan yaitu penilaian kegiatan risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Diukur menggunakan <i>skala Likert</i> 5 poin (1-5). (Mahmudi, 2007)
4. Budaya Organisasi (BO)	Keberadaan budaya dalam organisasi akan menjadi perekat dan pedoman dari seluruh kebijakan perusahaan serta tuntutan operasional bagi aspek-aspek lain dalam organisasi. Budaya organisasi yang positif akan memacu organisasi ke arah yang lebih baik. (Waridin dan Masrukhin, 2006).	Instrumen 7 butir pernyataan dengan menggunakan 3 indikator yaitu mengutamakan aspirasi orang lain, ketaatan terhadap peraturan dan penilaian prestasi. Diukur menggunakan <i>skala Likert</i> 5 poin (1-5) (Nurkhamid, 2008).

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel
(lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
5. Teknologi Informasi (TI)	Teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi (Wilkinson, 2005).	Intrumen 6 butir pernyataan dengan indikator komputerisasi, terintegrasi, jaringan internet, aplikasi dan keamanan komputer. Diukur menggunakan <i>skala Likert</i> 5 poin (1-5) (Kusuma, 2013).

Sumber: Data definisi dan pengukuran variabel diolah, 2018

C. Metoda Analisis Data

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena sosial tertentu. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghozali (2013), Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *minimum*, *maksimum*. Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran berupa tabel yang menjelaskan masing-masing variabel dan tentang profil responden mengenai jenis kelamin responden, pendidikan formal terakhir

responden, latar belakang pendidikan responden, jabatan responden dan lama berkerja responden yang berpartisipasi dalam penelitian. Analisis ini dilaksanakan terhadap jawaban responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan (indikator) pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai *loading* faktor yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett off Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi korelasi

antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor. Alasan penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Ada dua jenis rotasi yaitu *orthogonal rotation* dan *oblique rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. Sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, dan *Promax*. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai KMO and Bartlett's Test $> 0,50$ dan suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan antara masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor seluruh pertanyaan yang ditunjukkan dengan nilai faktor *Loading* $> 0,50$ (Ghozali, 2013).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama (Ghozali, 2013:47). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian

untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70.

3. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan analisis regresi yaitu mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013:85). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut:

$$SAP = b_1SDM + b_2KO + b_3SPI + b_4BO + b_5TI + e$$

Keterangan :

SAP	= Standar Akuntansi Akrua
b ₁ ..b ₅	= Koefisien arah regresi
SDM	= Sumber Daya Manusia
KO	= Komitmen Organisasi
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
BO	= Budaya Organisasi
TI	= Teknologi Informasi
e	= error

D. Pengujian Hipotesis

a. Uji R^2 (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013: 97). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2013:97)

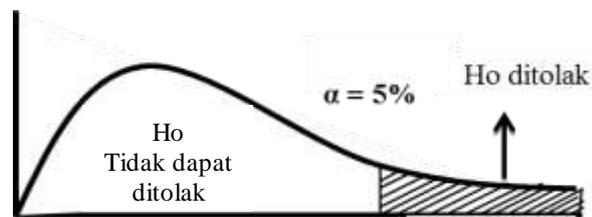
b. Uji F (*goodness of fit*)

Uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji f menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2013:97). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).

- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.



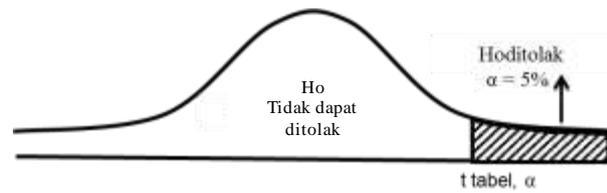
F Tabel
Gambar 3.1
 Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n - 1$ (Ghozali, 2013:98)

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi sangat berperan penting dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2012 tentang penerapan akrual yang mewajibkan semua OPD menerapkan akrual selambat-lambatnya pada tahun 2014. Meskipun dalam beberapa hal masih ada kendala, seperti pemahaman pegawai tentang sistem yang digunakan. Sebagian pegawai tidak memahami konsep namun sekedar menjalankan tugas.

Data penelitian ini sebanyak 68 kuesioner yang diisi oleh bendahara dan staf bagian keuangan/akuntansi dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh komitmen organisasi dan teknologi informasi terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Hal ini membuktikan komitmen organisasi dan teknologi informasi menjadi pengaruh penting dalam penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang standar pemerintah berbasis akrual.

Hasil pengujian regresi berganda terhadap variabel lain yang memengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual menunjukkan bahwa faktor eksternal dari luar diri responden yaitu sumber

daya manusia, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada OPD Kabupaten Temanggung.
2. Penelitian ini hanya meneliti sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan teknologi informasi sehingga masih banyak variabel lain yang perlu diteliti.
3. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuesioner tanpa wawancara, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis dan tidak dapat dipastikan pengisian kuesioner sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Penelitian ini menggunakan instrumen berdasar pada penelitian terdahulu dan belum bisa dipastikan bahwa instrumen tersebut telah teruji.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dan menambah jumlah sampel dengan objek lain misalnya semua OPD di Jawa Tengah sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digeneralisasi.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel komunikasi seperti penemuan Pratiwi (2015) yang mengungkapkan bahwa komunikasi

mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual, komunikasi merupakan proses yang di dalamnya semua partisipasi atau pihak-pihak yang berkomunikasi saling menciptakan, membagi, menyampaikan, dan bertukar informasi antara satu dan lainnya dalam rangka mencapai pengertian bersama.

3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioer dan wawancara agar data yang diperoleh tidak bias serta menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
4. Penelitian selanjutnya dapat lebih mencermati dalam memilih instrumen kuesioner dan yang telah teruji sehingga tidak terjadi respon bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Adirianto. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Skpd Kabupaten Sidoarjo, 6(November).
- Azman, T. (2015). Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur Serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti). *SOROT*, 10(1), 131–142.
- Bastian, Indra. 2003. Sistem Akuntansi Publik Konsep Untuk Pemerintahan. Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Bastian, Indra. 2005
- Chatab, Nevizond. 2007. Profil Budaya Organisasi. Bandung : Penerbit Alfabeta
Diakses pada Selasa, 11 Juni 2018
- Dianne Natalia Cristianti (2013). “Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Fred Luthans, (2006), Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh, PT. Andi: Yogyakarta.
2. Husein Umar, (2008)
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iznillah, M. L. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra dkk (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1.
- Ida Najati dkk (2016). “Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI : Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga”. Magister Pasca Sarjana Universitas Mataram.
- Jensen dan Meckling. (1976). The Theory oh Te Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Conomic*, 3:305-360.
- Joko, Widodo, 2001, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insancendikia

- Ida Najati dkk (2016). "Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI : Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga". Magister Pasca Sarjana Universitas Mataram.
- Jaladri. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(November).
- Jensen dan Meckling. (1976). The Theory oh Te Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Conomic*, 3:305-360.
- Ksuma, Ririz Setiawati. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI*. Jurnal Universitas Jember
- Nadir, R., & Hasyim. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia , terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). *AKUNTABEL*, 14(1), 57–68.
- Narjati. (2016). Implementasi akuntansi berbasis akruaI: pengujian determinan dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan kementrian/lembaga. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 1–18.
- Pratiwi, A. D. (2015). Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Bandung. *ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management*, 4(2), 1612–1619.
- Putra. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 14–32.
- Republik Indonesia (2003), Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia (2005), Peraturan pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- Republik Indonesia (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2010), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Robbins SP, dan Judge. 2002. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat
- Rukmi Juwita (2013). “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. *Trikonomika* Volume 12, No. 2, Desember 2013.
- Satrio. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59–69. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>
- Soimah. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Universitas Bengkulu*, (Skripsi).
- Suareni, D. dkk. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Penerapan Sap Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Bangli). *Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Sugiarto. (2014). Faktor-Faktor Pendukung atas Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintahan di Kota Solo. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana*, (November), 1713–1726.
- Semarang.bpk.go.id. Diakses pada Selasa, 11 Juni 2018
- Sri Ayem dkk (2017). “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP Berbasis Akrua, SIMDA dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 25, No 1.
- Tempo Interaktif.(14 Desember 2010). Pemerintah terapkan standar akuntansi baru. www.tempo.com Diakses pada Rabu, 13 November 2017
- Waridin dan Masrukhin, 2006, “Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai”, *Ekobis*, Vol.7, No.2.